DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya
e-Mail : dp3appkb@kalteng.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: 001/PPID/I/DP3APPKB/2026

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi informasi publik pada tahun 2025, berikut kami sampaikan **informasi yang dikategorikan sebagai hoaks dan/atau disinformasi** yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

No.	Informasi Hoaks/Disinformasi	Penjelasan/Klarifikasi	Tanggal Ditemukan	Tindak Lanjut
1.	-	-	-	-
dst	-	-	-	-

Berdasarkan daftar diatas dapat kami informasikan bahwa pada tahun 2024 tidak terdapat informasi **informasi yang dikategorikan sebagai hoaks dan/atau disinformasi** yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan daftar ini bertujuan untuk menjaga akurasi informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 02 Januari 2026
KEPALA DINAS P3APPKB PROV. KAL-TENG
selaku Kepala Badan Publik,

Hj. [illegible] VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Brigjen Katamso No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya
e-Mail : dp3appkb@kalteng.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 002/PPID/I/DP3APPKB/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dengan ini menyatakan bahwa:

Badan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam menyediakan serta menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Apabila terdapat informasi yang teridentifikasi sebagai **hoaks** atau **disinformasi** yang beredar di tengah masyarakat dan berkaitan dengan tugas serta ruang lingkup kami, maka Badan Publik berkomitmen untuk **mengumumkan klarifikasi atau penjelasan resmi** melalui kanal informasi yang sah, guna meluruskan informasi yang tidak benar tersebut.

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh Badan Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 02 Januari 2026
KEPALA DINAS P3APPKB PROV. KAL-TENG
selaku Kepala Badan Publik,

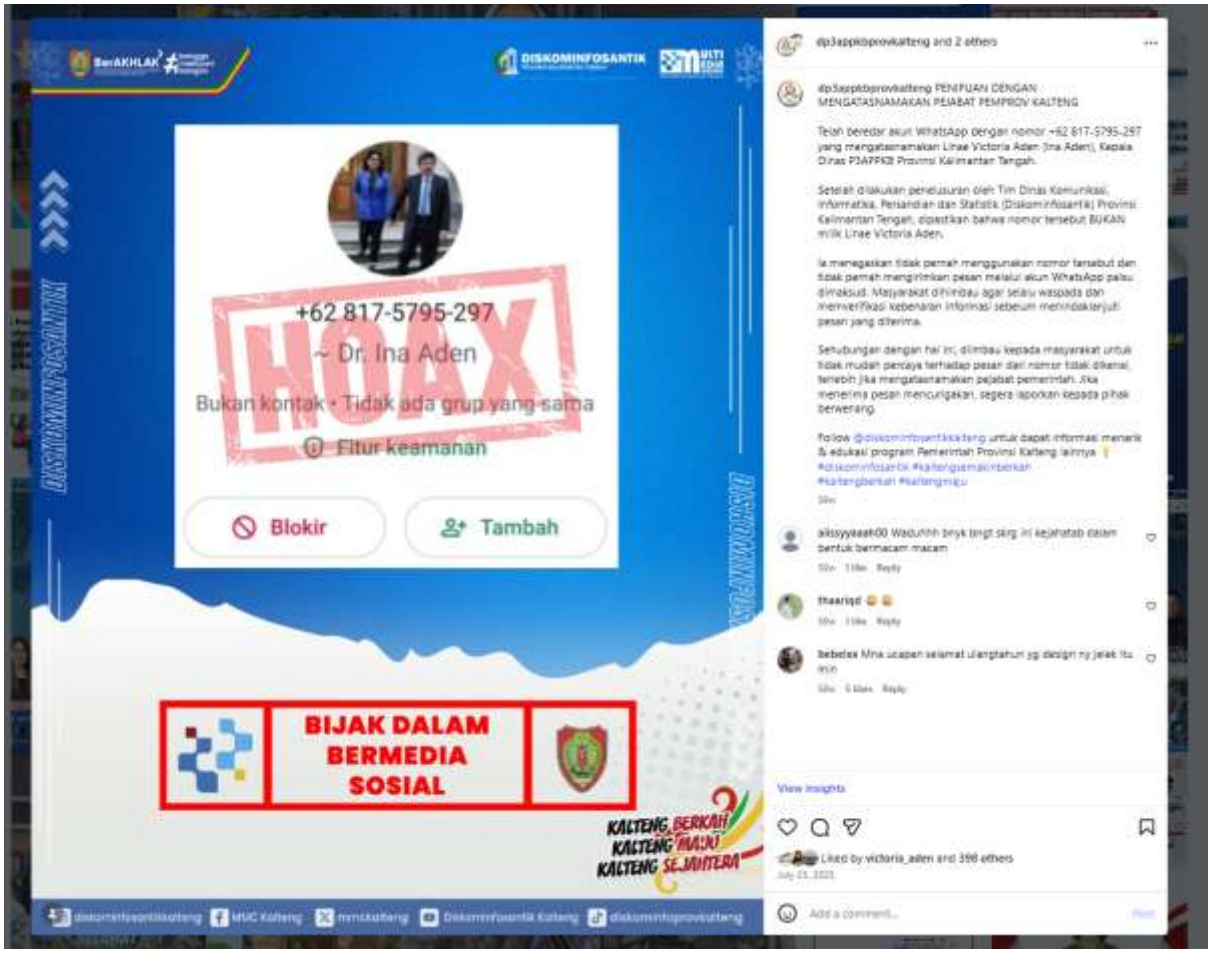
Text

VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kategori Hoaks Terkait Layanan pada DP3APPKB Prov. Kalteng

1. Hoaks tentang Bantuan dan Fasilitas
   - Informasi palsu terkait adanya bantuan dana langsung tunai, santunan, atau paket sembako dari DP3APPKB yang sebenarnya tidak pernah diumumkan.
   - Klaim adanya program bantuan pernikahan dini atau subsidi keluarga berencana yang tidak sesuai dengan kebijakan resmi.
2. Hoaks tentang Rekrutmen/Perekrutan
   - Informasi menyesatkan terkait lowongan kerja/CPNS/PPPK yang mengatasnamakan DP3APPKB.
   - Penipuan dengan modus pungutan biaya administrasi palsu.
3. Hoaks tentang Layanan UPT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
   - Isu bahwa korban kekerasan harus membayar biaya untuk mendapatkan perlindungan/pendampingan.
   - Disinformasi terkait nomor layanan darurat yang dipalsukan.
4. Hoaks tentang Program Keluarga Berencana (KB)
   - Informasi keliru bahwa KB tertentu berbahaya atau program KB dilarang oleh pemerintah.
   - Hoaks tentang adanya pemaksaan dalam program KB.
5. Hoaks tentang Stunting dan Ketahanan Keluarga
   - Klaim palsu mengenai obat instan pencegah stunting yang disebarkan dengan mengatasnamakan dinas.
   - Disinformasi seolah DP3APPKB hanya fokus pada perempuan saja, padahal program juga menyasar keluarga secara menyeluruh.
6. Hoaks tentang Anggaran dan Program Dinas
   - Informasi menyesatkan mengenai penyelewengan dana bantuan tanpa dasar.
   - Isu bahwa program dinas hanya diberikan kepada kelompok tertentu.



https://www.instagram.com/p/DMhmxZfveI9/